

RINGKASAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 900.1.15.1-3169 TAHUN 2023 TENTANG HASIL EVALUASI RAPERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROV. JATENG TA 2022 DAN RAPERGUB JATENG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROV JATENG TA 2022
(Kamis, 31 Agustus 2023)

NO	JENIS PERTANYAAN / TANGGAPAN	JUMLAH PERTANYAAN / TANGGAPAN
I.	Kesesuaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rapergub Jateng tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jateng TA 2022 dengan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD.	
A.	KONSISTENSI	
B.	LEGALITAS	
C.	KEBIJAKAN	
1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	
a.	Pendapatan Daerah	15
b.	Belanja Daerah	8
c.	SILPA	1
2.	NERACA	
a.	Aset Lancar	4
b.	Investasi Jangka Panjang	3
c.	Kewajiban	4
3.	LAPORAN OPERASIONAL	1
D.	INFORMASI LAINNYA	
1.	Realisasi Anggaran Belanja <i>Mandatory Spending</i> TA 2022	1
2.	Realisasi Belanja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1
3.	Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	3
4.	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i>	4
5.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	4
II.	Kesesuaian Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rapergub Jateng tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jateng TA 2022 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.	1
III.	Lain-Lain	
TOTAL		50

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3169 Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal penting terkait saran dan masukan yang perlu **ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

I. Kesesuaian Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rapergub Jateng tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jateng Tahun Anggaran (TA) 2022 dengan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD.

A. KONSISTENSI

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, **telah sesuai** mencakup Pagu Anggaran, Nomenklatur, Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

B. LEGALITAS

Hasil evaluasi legalitas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, **telah mengikuti** landasan yuridis dan **telah menyajikan** informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Secara umum pada TA 2022 terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan (8 SKPD) dan tingkat capaian realisasinya tidak optimal.

➤ Saran Kemendagri :

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus **lebih cermat** dalam menetapkan target anggaran setiap obyek Pendapatan Daerah, sehingga perencanaan target pendapatan **dapat terukur dan rasional**.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik secara berkala, efektif dan relevan dalam mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan DAK Fisik.
- melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- menyelenggarakan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- Membuat Tim Pendapatan Asli Daerah lintas Sektor.
- Melakukan koordinasi yang baik dengan calon pemberi Hibah dan membuat perjanjian hibah dengan calon pemberi hibah untuk memastikan penerimaan Hibah dapat terealisasi di tahun berjalan

🚦 Tindak Lanjut

- Saran akan ditindaklanjuti, perencanaan pada setiap obyek penentuan target pendapatan daerah akan dilakukan secara terukur dan rasional.
- Kedepan pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengeluarkan terobosan dalam meningkatkan kolektibilitas pajak dan melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi disektor pendapatan daerah.
- Deviasi Pendapatan Transfer terjadi karena Kebijakan Dana Transfer bersifat dinamis.
- Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan Mengupayakan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang didanai dari DAK Fisik untuk optimalisasi penggunaan DAK Fisik.

b. BELANJA DAERAH

Pada TA 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal (9 SKPD) terdiri atas capaian realisasi belanja barang dan jasa yang tidak optimal (7 SKPD) dan capaian realisasi belanja modal yang tidak optimal (3 SKPD).

➤ Saran Kemendagri :

- Meningkatkan kualitas perencanaan belanja daerah dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien terhadap pencapaian output yang ditetapkan.
- Melakukan pengadaan dini dan Optimalisasi pengadaan melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring
- Melakukan pendekatan yang efektif kepada pemilik tanah untuk percepatan kesepakatan atas jual beli tanah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan.
- Melakukan pengawasan dan mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk menghindari pemutusan kontrak
- mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran

🚦 Tindak Lanjut

Sepakat dengan saran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ke Depan akan lebih cermat dalam penyusunan, Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja OPD

c. SILPA

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 s.d. Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2018	Rp26.186.587.329.000,00	Rp1.612.602.481.841,54	6,16%
2019	Rp27.750.939.235.000,00	Rp1.119.157.446.700,00	4,03%
2020	Rp27.374.409.350.000,00	Rp861.343.812.527,00	3,15%
2021	Rp27.444.652.233.000,00	Rp1.435.692.884.754,00	5,23%
2022	Rp25.147.706.241.000,00	Rp1.236.469.002.535,00	4,92%

➤ Saran Kemendagri :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyempurnaan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA.

🚦 Tindak Lanjut

Saran akan ditindaklanjuti dengan lebih cermat dalam melakukan perhitungan Prognosis Pendapatan Daerah.

2) NERACA

a. ASET LANCAR

Mencermati Saldo Kas, Piutang, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan per-31 Desember 2022.

➤ Saran Kemendagri :

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus memastikan kas di Bendahara Penerimaan SKPD per 31 Desember sudah harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Melakukan upaya yang strategis, efektif dan relevan dalam rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah
- Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan pihak Bank penempatan RKUD dan/ atau Bank Kerja Sama yang dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan (Bank Transitoris)
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

🚦 Tindak Lanjut

- Saran akan menjadi perhatian. Kas bendahara penerimaan merupakan saldo kas yang diterima bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pengelola Pendapatan setelah jam operasional bank berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan telah disetorkan bulan Januari 2023.
- Terkait Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan upaya-upaya mengintensifkan penagihan pajak.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan persediaan dan cermat merencanakan sesuai kebutuhan pada OPD.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.359.256.134.721,51. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp95.652.134.656,41 atau 1,28%.

➤ Saran Kemendagri :

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan Penyehatan BUMD dengan melakukan efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD.

Tindak Lanjut

Saran akan menjadi perhatian kedepan akan dilakukan perbaikan tata Kelola dan perubahan kelembagaan BUMD menjadi perseroda sehingga dapat lebih profesional dalam pengelolaan bisnisnya.

c. KEWAJIBAN

Kewajiban per 31 Desember 2022 berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp338.699.949.467,91.

➤ Saran Kemendagri :

- penguatan pembinaan oleh PPKD selaku BUD kepada seluruh Bendahara SKPD terkait ketaatan penyetoran atas pajak Pusat
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2022.

Tindak Lanjut

Kewajiban Jangka Pendek dimaksud, seluruhnya sudah diselesaikan.

3) LAPORAN OPERASIONAL (LO)

➤ Saran Kemendagri :

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tindak Lanjut

Saran akan menjadi perhatian dengan menjadikan dokumen LO sebagai pertimbangan dalam penyusunan besaran target pendapatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

➤ Saran Kemendagri

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun mendatang harus meningkatkan alokasi belanja untuk Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada Daerah

Tindak Lanjut

Saran akan ditindaklanjuti, kedepan dalam mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik daerah akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

➤ Saran Kemendagri

Mengupayakan pencapaian output secara optimal untuk seluruh sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pemenuhan SPM untuk seluruh bidang

✚ **Tindak Lanjut**

Saran akan menjadi perhatian, kedepan akan lebih ditingkatkan dalam perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

➤ Saran Kemendagri

Memprioritaskan belanja penggunaan PDN dan melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase PDN terintegrasi dengan TKDN.

✚ **Tindak Lanjut**

Saran akan ditindaklanjuti, Kedepan akan memprioritaskan belanja penggunaan produk dalam negeri.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk percepatan penurunan Stunting

➤ Saran Kemendagri :

- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan Stunting
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan penurunan Stunting

✚ **Tindak Lanjut**

Saran akan ditindaklanjuti, kedepan akan lebih ditingkatkan dalam perencanaan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan Stunting.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

➤ Saran Kemendagri

- Meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka percepatan realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

✚ **Tindak Lanjut**

Saran akan menjadi perhatian, kedepan akan lebih diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan yang mendukung Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

II. Kesesuaian Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Rapergub Jateng tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov Jateng TA 2022 dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

➤ Saran Kemendagri :

Terhadap temuan BPK tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

 **Tindak Lanjut**

Sependapat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun *action plan* tindak lanjut, yang dimonitoring oleh Inspektorat.

III. LAIN-LAIN

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.